

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kebijakan Politik Etis dalam bidang pendidikan yang diberlakukan oleh pemerintah Hindia Belanda memang membuka kesempatan banyak bagi pemuda-pemuda Indonesia untuk melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi di negeri Belanda. Pemuda-pemuda Indonesia di luar negeri, terutama di negeri Belanda yang kebanyakan berstatus mahasiswa, berhasil mendirikan sebuah organisasi yang bernama *Indische Vereeniging* tahun 1908 untuk menggalang persatuan.

Mulanya organisasi yang didirikan oleh beberapa mahasiswa Indonesia di Belanda seperti Sutan Kasayangan, Noto Soeroto, dan Sosrokartono ini hanya bersifat organisasi sosial. Akan tetapi semenjak berakhirnya Perang Dunia I tahun 1919 perasaan anti kolonialisme dan imperialisme di kalangan pemimpin *Indische Vereeniging* makin menonjol. Terlebih sejak adanya seruan Presiden Woodrow Wilson dari Amerika setelah Perang Dunia-I berakhir, kesadaran mereka tentang hak dari bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri dan merdeka dari penjajahan Belanda semakin kuat.

Sementara di Eropa dan Amerika selalu didengungkan kemerdekaan dan kebebasan oleh kaum liberal dan demokrat. Semangat kebebasan dan kemerdekaan dari Perang Kemerdekaan Amerika yang didengungkan melalui Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson, yakni *right of self determination* untuk seluruh bangsa di dunia cukup memberikan suatu perhatian yang mendalam kepada para mahasiswa Indonesia di Belanda untuk menyadari adanya suatu bangsa, bangsa Indonesia yang masih dijajah oleh Belanda. (Nalenan 1981:33)

Pada tahun-tahun awal setelah Perang Dunia I, jumlah mahasiswa Indonesia yang datang ke negeri Belanda semakin banyak. Dengan bernaung dalam politik etis, pemerintah Hindia Belanda perlahan-lahan memperluas kesempatan bagi putra-putra Indonesia dari golongan bangsawan untuk masuk sekolah dasar dan menengah berbahasa Belanda (Jhon Ingleson, 1993:3). Sampai akhir perang dunia pertama, kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda yang mengharuskan pemuda Indonesia yang berhasil lulus dengan nilai baik melanjutkan studinya ke negeri Belanda hanya sedikit, tapi makin lama makin meningkat jumlahnya. Di antara mahasiswa yang baru datang ke negeri Belanda dan bergabung dengan *Indische Vereeniging* terdapat Sutomo, Mohammad Hatta, Sartono, Ali Sastroamidjojo, Budiarto, Iwa Kusumasumantri, Isqak, dan lain-lain yang kemudian menjadi tohoh-tokoh politik nasionalisme pada tahun 1920-an.

Perhimpunan Indonesia ketika masih menggunakan nama Belanda sudah melakukan pergerakan kebangsaan. Aktivitas politik yang dilakukan oleh para pelajar ini juga ditempuh dengan menerbitkan sebuah majalah yang bernama Hindia Poetra pada tahun 1916. Perubahan tujuan dari gerakan *Indische Veerniging* juga ditandai dengan perubahan nama menjadi *Indonesische Vereeniging* saat diketuai oleh Hermen Kartowisastro tahun 1922. Pergantian

nama ini diartikan dengan perasaan bersatu antara mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang ada di Belanda. Para mahasiswa yang tergabung dalam *Indonesische Vereeniging* ini juga giat berdiskusi, mereka melakukan diskusi di rumah anggota-anggota perkumpulan yang memiliki keluarga di Belanda. Selain berdiskusi dengan sesama anggota para anggota perkumpulan ini juga berdiskusi dengan orang Belanda.

Setelah berganti nama pada 1925 *Indonesische Veerniging* menjadi Perhimpunan Indonesia gerakan melawan penjajah pun semakin gencar. Pada tahun 1925 masa kepemimpinan Soekiman Wirjosandjojo Perhimpunan Indonesia mengeluarkan Manifesto Politik. Isinya menyangkut ketegasan sikap pergerakan organisasi Perhimpunan Indonesia, yakni:

1. Rakyat Indonesia sewajarnya diperintah oleh pemerintah yang dipilih mereka sendiri;
2. Dalam memperjuangkan pemerintahan sendiri itu tidak diperlukan bantuan dari pihak mana pun dan;
3. Tanpa persatuan kukuh dari pelbagai unsur rakyat tujuan perjuangan itu sulit dicapai. (http://id.wikipedia.org/wiki/Indische_Vereeniging)

Pergantian nama perkumpulan ini juga suatu bentuk perlawanan dari para pelajar tersebut. Para pelajar ini mengganti nama perkumpulan untuk menghilangkan sifat kolonial yang diganti dengan nama-nama yang bersifat nasional. Seperti nama majalah *Hindia Poetra* diganti menjadi *Indonesia Merdeka*. Kemudian tentang perkataan *Inlanders* (orang-orang pribumi atau penduduk negeri jajahan) diganti menjadi *bumi putera*. Nama Perhimpunan Indonesia menggantikan nama *Indonesische Veerniging*, ini resmi digunakan pada tanggal 8 Februari 1925.

Perhimpunan Indonesia dengan memakai prinsip non-kooperatif, menghendaki suatu kebijaksanaan berdikari. Perhimpunan Indonesia akan mengumandangkan rasa hormat pada diri sendiri ke dalam kalbu rakyat Indonesia. Sebab hanya satu bangsa yang telah menyingkirkan perasaan tergantung saja, yang tidak takut akan hari depan.

Selain merubah nama perkumpulan para anggota Perhimpunan Indonesia juga merubah majalah yang mereka terbitkan dari Hindia Poetra menjadi Indonesia Merdeka. Selain itu untuk menambah kesan kebangsaan ditetapkan pula para anggota Perhimpunan Indonesia harus menggunakan kopiah. Hal ini sebagai penunjuk identitas Perhimpunan Indonesia. Selain itu perubahan juga terjadi pada nama-nama anggota yang berbau feodal atau kebangsawanan. Nama-nama anggota Perhimpunan Indonesia yang ada nama kebangsawanannya sudah tidak dipegunakan lagi dalam lingkungan teman dan masyarakat. Contohnya seperti salah satu nama tokoh Perhimpunan Indonesia yaitu Nazir Datuk Pamuntjak kemudian disebut Nazir Pamuntjak saja.

Sejak awal berdiri telah diformulasikan secara jelas program-program Perhimpunan Indonesia, meliputi perjuangan mencapai kemerdekaan dan juga ditunjang dengan program dalam mempropagandakan masalah Indonesia ke dunia Internasional. Pada tahun 1925 Perhimpunan Indonesia diketuai oleh Sukiman, telah disusun program-program secara tegas dan lebih intensif. Pasal-pasal dalam Perhimpunan Indonesia jelas mencerminkan kesadaran Perhimpunan

Indonesia, bahwa Indonesia tidak berdiri sendiri, yakni terlihat pada pasal 1, 2, 3. adapun pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

- Pasal 1 : Mempropagandakan asas-asas perhimpunan lebih intensif, terutama di Indonesia.
- Pasal 2 : Menarik perhatian internasional pada masalah Indonesia.
- Pasal 3 : Perhatian para anggota harus dibangkitkan buat soal-soal internasional dengan mengadakan ceramah-ceramah, bepergian ke negara-negara lain untuk studi dan lain sebagainya. (Sudiyo, 2004:65-66)

Untuk melaksanakan program-program kerja Perhimpunan Indonesia Pasal 1, telah ditempuh oleh Ali Sastroamidjojo dengan mengadakan penyelundupan majalah Indonesia Merdeka ke Indonesia. Sedangkan untuk pasal 2 dan 3 baru dapat dilaksanakan ketika Perhimpunan Indonesia di ketuai oleh Mohammad Hatta pada tahun 1926.

Aktivitas politik mahasiswa Indonesia di negeri Belanda merupakan pemberontakan terhadap paternalisme kekuasaan penjajahan. Mereka terutama terbakar oleh apa yang mereka rasakan sebagai penghinaan terhadap kebudayaan, bahasa, dan pikiran Indonesia yang dianggap rendah dari peradaban Eropa. Menurut keyakinan mahasiswa ini, hanya kemerdekaanlah yang dapat mengembalikan harga diri rakyat Indonesia. Dalam suatu pernyataan mengenai prinsip-prinsip Perhimpunan Indonesia sebagai suatu ideologi yang harus dilaksanakan, adalah melalui jalan aksi massa:

1. Hanya suatu kesatuan Indonesia yang mengesampingkan perbedaan-perbedaan sempit dapat menghancurkan kekuasaan penjajah. Tujuan bersama untuk membentuk suatu Indonesia merdeka menuntut pembinaan rasa kebangsaan yang didasarkan pada suatu aksi massa yang sadar dan percaya diri.

2. Syarat mutlak untuk tercapainya tujuan itu adalah adanya partisipasi seluruh lapisan masyarakat Indonesia dalam suatu perjuangan yang terpadu untuk mencapai kemerdekaan.
3. Unsur pokok yang dominan dalam setiap masalah politik penjajah ialah konflik kepentingan antara penguasa dan yang dijajah. Kecenderungan pihak penguasa untuk mengaburkan dan menutupi masalah ini harus dilawan dengan mempertajam dan mempertegas adanya konflik kepentingan tersebut.
4. Melihat adanya dislokasi dan demoralisasi sebagai akibat pengaruh pemerintah kolonial terhadap kesehatan fisis dan psikologis dari kehidupan orang Indonesia, diperlukan sejumlah besar usaha untuk memulihkan kondisi rohani dan material menjadi normal kembali. (A.K. Pringgodigdo, 1980:51)

Kemajuan dan perkembangan Perhimpunan Indonesia yang makin lama makin bersikap radikal terhadap pemerintah diperhatikan dengan penuh kecemasan oleh pemerintah Belanda. Terlebih setelah Perhimpunan Indonesia berada di bawah pimpinan Mohammad Hatta. Perhimpunan Indonesia dalam aktivitas politiknya juga menghadiri dan pertemuan publik atau forum-forum Internasional.

Dari uraian di atas, penulis memiliki ketertarikan untuk mencoba mengkaji lebih dalam mengenai aktivitas politik Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda dalam usaha mencapai cita-cita kemerdekaan Indonesia dari cengkeraman kekuasaan penjajahan Belanda.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, ada beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi di sini adalah sebagai berikut:

1. Aktivitas politik Perhimpunan Indonesia dalam usaha pencerminan identitas kebangsaan.

2. Aktivitas politik Perhimpunan Indonesia dalam usaha mencapai kemerdekaan Indonesia.

1.3 Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini tidak terlalu meluas maka penelitian ini akan dibatasi pada aktivitas politik Perhimpunan Indonesia dalam usaha mencapai kemerdekaan Indonesia.

1.4 Rumusan Masalah

Sesuai dengan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa sajakah aktivitas politik yang dilakukan Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda dalam usaha mencapai kemerdekaan Indonesia?

1.5 Tujuan, Kegunaan dan Ruang Lingkup Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini merupakan jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aktivitas politik yang dilakukan Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda dalam usaha mencapai kemerdekaan Indonesia.

1.5.2 Kegunaan Penelitian

1. Sebagai wacana untuk memperluas cakrawala tentang sejarah pergerakan nasional Indonesia

2. Untuk lebih memahami kegiatan politik yang dilakukan Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda.
3. Sebagai tambahan materi pelajaran Sejarah Nasional Indonesia dan Umum di sma kelas IX semester genap.

1.5.3 Ruang Lingkup Penelitian

Mengingat masalah tersebut cukup umum, demi menghindari kesalahpahaman dalam penelitian, maka peneliti memberikan kejelasan tentang sasaran dan tujuan peneliti mencakup beberapa hal, yakni objek penelitiannya adalah aktivitas politik Perhimpunan Indonesia. Adapun tempat penelitian di perpustakaan Unila dengan waktu penelitian tahun 2011 dan bidang ilmu dalam penelitian ini adalah ilmu Sejarah.